

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF DI KELURAHAN NGAGLIK KECAMATAN BATU KOTA BATU

Implementation of Community Empowerment Policies in Improving the Creative Economy in Ngaglik Village Batu Sub-District Batu City

Maria Da Costa Delima^{1*}
Ignatius Adiwidjaja¹
Roro Merry Chornelia
Wulandary¹

¹Universitas Tribhuwana Tunggaladewi,
Malang

*corresponding author:
deladelima08@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kreatif di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kreatif meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya dan pendidikan masyarakat. Penelitian ini menyoroti peran pemerintah, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendorong kemampuan kreatif masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta dokumen terkait, dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Analisis data dilakukan secara induktif untuk memastikan kesesuaian dengan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, keterbatasan sumber daya, sikap aktif pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung koordinasi. Keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak, terutama dalam mengatasi kendala pendanaan dan akses pasar. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang tantangan dan peluang dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kreatif di tingkat lokal.

Kata Kunci:

Pemberdayaan masyarakat
Ekonomi kreatif
Implementasi kebijakan

Keywords:

Community empowerment
Creative economy
Policy implementation

Abstract

This study aims to analyze the implementation of community empowerment policies for improving the creative economy in Ngaglik Village, Batu District, and Batu City. The approach used is qualitative, with a focus on community empowerment to improve the creative economy, despite obstacles such as limited resources and community education. This study highlights the role of government, as well as collaboration between the public and private sectors, in encouraging the creative abilities of the community. We obtained data through interviews, observations, and related documents using purposive sampling techniques. We conducted an inductive data analysis to align with the field's reality. The study shows that four main things affect how community empowerment policies are put into place: good communication between the government and the community; limited resources; active attitudes of those putting the policies into action; and bureaucratic structures that help with coordination. The success of the empowerment program is highly dependent on the support of various parties, especially in terms of overcoming funding constraints and market access. Thus, this study contributes to enriching our understanding of the challenges and opportunities of community empowerment to improve the creative economy at the local level.



© year The Authors. Published by **Penerbit Forind**. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment>

Submit: 11-04-2025

Accepted: 20-04-2025

Published: 25-04-2025

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan sumber daya alam, yang memberikan potensi besar untuk pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif

melibatkan penciptaan nilai tambah melalui ide-ide kreatif dan inovatif yang memanfaatkan kekayaan budaya dan sumber daya lokal. Salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi kreatif adalah melalui

pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Perda Kota Batu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batu No.37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2020 ditetapkan dengan pertimbangan, bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat Desa/Kelurahan perlu menetapkan peraturan Walikota Batu No.37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, subsektor ekonomi kreatif memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, Ekonomi kreatif juga terbukti berperan besar terhadap ekonomi nasional, di tahun 2022 kontribusinya terhadap PDB nasional mencapai Rp1280 triliun. Kontribusi tenaga kerja sektor ekonomi kreatif pada nasional pun pada 2022 mencapai 17,7 persen.

Istilah “pemberdayaan masyarakat” cukup sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini tidak asing lagi ditelinga kita mengingat saat ini cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, organisasi sosial/kemasyarakatan, maupun pihak swasta. Berita mengenai program pemberdayaan masyarakat cukup sering kita lihat/dengar mulai dari koran, radio, televisi, dan media internet. Program pemberdayaan masyarakat yang kita kenal, umumnya merupakan sebuah program yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep “pemberdayaan” berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “empowerment”.

Dalam hal ini konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari, seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, Pendidikan dan kesehatan (Hamid, 2018).

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat sering kali untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah umumnya untuk meningkatkan ekonomi dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat ini, tampaknya terus didukung dan dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman dan daya saing di era globalisasi, tujuannya agar masyarakat tidak ketinggalan zaman dan memiliki daya saing di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Secara konseptual “peningkatan” berasal dari kata “tingkat”, yang berarti “lapis” atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan dapat diartikan sebagai upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya (Harahap, 2018).

Ekonomi kreatif merupakan bidang usaha yang dapat digeluti masyarakat dalam upaya peningkatan perekonomian. Dalam pemberdayaan masyarakat, bidang ekonomi kreatif sangat potensial dalam menciptakan peluang usaha baru melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Secara konseptual ekonomi kreatif didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia (Toffler,

1970). Istilah “ekonomi kreatif” berkembang dari konsep modal berbasis kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu daerah (Purnomo, 2016).

Menurut Kementerian Perdagangan Indonesia (2009), Ekonomi kreatif didefinisikan sebagai wujud dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas, yang mana pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Salah satu pendukung berkembangnya ekonomi kreatif di suatu daerah adalah sektor pariwisata khususnya yang berbasis keunikan budaya lokal. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, keberadaan pariwisata setidaknya memberikan delapan keuntungan bagi masyarakat. Pertama, meningkatkan kesempatan untuk membuka usaha, Kedua memperluas kesempatan kerja. Ketiga, meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah, Keempat, meningkatkan pendapatan nasional. Kelima, mempercepat proses pemerataan pendapatan. Keenam, meningkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan. Ketujuh, memperluas pasar produk dalam negeri, dan terakhir, memberikan dampak multiplier dalam perekonomian yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi wisatawan, investor, maupun para pedagang (Fathullah, 2021). Delapan keuntungan ini tentu saja sangat mendukung kemajuan ekonomi kreatif masyarakat yang tinggal di sekitar tempat wisata.

Berdasarkan pemaparan konsep ekonomi kreatif yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif bisa menjadi salah satu alternatif bidang usaha untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan creative capital yang dimiliki, masyarakat dapat mengembangkan model ide dan talenta yang bersumber dari masyarakat itu sendiri untuk dapat menciptakan suatu produk inovasi yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Pola pikir kreatif yang dimiliki oleh masyarakat ini, sebagai potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kelurahan Ngaglik, yang terletak di Kecamatan Batu, Kota Batu, adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif. Dengan lingkungan alam yang indah dan budaya lokal yang kaya, Ngaglik memiliki berbagai potensi untuk mengembangkan sektor-sektor seperti pariwisata, kerajinan tangan, dan kuliner lokal. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan karena berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya akses ke pasar, dan rendahnya kapasitas. Rendahnya kapasitas yang dimaksud adalah masyarakat kelurahan ngaglik pada umumnya merupakan tamatan SMP dan juga SMA sehingga pemerintah perlu memberikan pemberdayaan bagi masyarakat dalam mengembangkan ide-ide kreatif.

Pemerintah Kota Batu telah menyadari pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kreatif di wilayahnya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan telah dirancang dan diimplementasikan untuk memberdayakan masyarakat Ngaglik. Kebijakan-kebijakan ini mencakup pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, pengembangan infrastruktur, dan promosi produk lokal. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ngaglik.

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis memilih topik dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Ekonomi Kreatif di Kelurahan Ngaglik”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan filosofi postpositivisme, yang bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kreatif di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi kreatif, terutama di bidang kerajinan tangan

dan kuliner, meskipun menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kapasitas masyarakat yang sebagian besar memiliki pendidikan hingga tingkat SMP dan SMA. Penelitian ini melibatkan 15 informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling, terdiri dari 5 aparat kelurahan, 7 pelaku UMKM lokal, dan 3 perwakilan dari sektor swasta yang berkontribusi dalam pengembangan ekonomi kreatif. Fokus penelitian ini adalah pada peningkatan kemampuan kreatif masyarakat serta peran pemerintah dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dan observasi langsung terhadap masyarakat, pelaku UMKM, dan pemerintah setempat, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan laporan terkait. Teknik analisis data dilakukan secara induktif, dengan mengorganisir dan mengkategorikan data, kemudian menyusun pola serta menarik kesimpulan yang dapat dipahami. Keabsahan data dijaga dengan memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan kenyataan di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Kelurahan Ngaglik, yang terletak di Kecamatan Batu, Kota Batu, adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif. Dengan lingkungan alam yang indah dan budaya lokal yang kaya, Ngaglik memiliki berbagai potensi untuk mengembangkan sektor-sektor seperti pariwisata, kerajinan tangan, dan kuliner lokal. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan karena berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya akses ke pasar. Pemerintah Kota Batu telah menyadari pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kreatif di wilayahnya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan telah dirancang dan

diimplementasikan untuk memberdayakan masyarakat Ngaglik. Kebijakan-kebijakan ini mencakup pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, pengembangan infrastruktur, dan promosi produk lokal.

Berikut merupakan penjelasan Bapak Ervan Yudhi Setiawan selaku Sekretaris Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu, Kota Batu. Dalam wawancara 28 Oktober 2024 mengatakan:

“Faktor pendukung dari program pemberdayaan masyarakat adalah keterlibatan semua unsur, baik dari pemerintah kelurahan maupun masyarakat atau pelaku UMKM, pada saat sosialisasi serta pada saat pemberian pelatihan dan pengembangan. Selain itu, respon dan partisipasi masyarakat juga sangat baik. Dengan demikian, program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara efektif dan masyarakat dapat merasakan dampak dari program pemberdayaan yang ada”

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Ninik Herawati selaku kasi pemberdayaan dan perekonomian kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu, Kota Batu. Wawancara pada 28 Oktober 2024 mengatakan:

“Kelurahan sangat mendukung adanya program pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan sosialisasi, pelatihan, pendampingan dalam proses pemasaran, hingga mendatangkan investor dari luar daerah untuk memperkenalkan produk usaha dari pelaku UMKM. Dengan demikian, kehidupan masyarakat dapat semakin sejahtera”.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan dengan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kreatif di kelurahan ngaglik sudah sangat baik. Hal ini didasari oleh keterlibatan pemerintah kelurahan ngaglik dan juga partisipasi dari pelaku UMKM dalam pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, pendampingan sampai dengan proses pemasaran. Sehingga program pemberdayaan bisa berjalan dengan baik

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan

Ekonomi Kreatif Di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu

Faktor kendala ini suatu hal yang menjadi rintangan dalam pencapaian suatu tujuan baik tujuan individu maupun tujuan kelompok. Jika dikaitkan dengan program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kreatif di kelurahan ngaglik maka kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Anggaran

Anggaran merupakan salah satu hal terpenting dalam merencanakan pembangunan. Dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kreatif di kelurahan ngaglik. Pada saat menjalankan program tentunya membutuhkan anggaran yang cukup. Akan tetapi dalam upaya untuk mendukung program pemberdayaan ini anggaran kelurahan tidak sepenuhnya dianggarkan dalam mendukung program pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi kreatif sehingga perlu berjalan secara bertahap.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ervan Yudhi Setiawan selaku Sekretaris Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu, Kota Batu. Dalam wawancara 28 Oktober 2024 mengatakan:

“Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, tentunya diperlukan modal. Namun, meskipun ada kebijakan pemberdayaan, jika tidak disertai dengan alokasi modal atau bantuan dana dari pemerintah, masyarakat akan tetap kesulitan untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif”.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Ibu Ninik Herawati selaku kasi pemberdayaan dan perekonomian kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu, Kota Batu. Wawancara pada 28 Oktober 2024 mengatakan:

“Proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat harus didukung oleh modal. Namun, anggaran pemerintah untuk program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi kreatif sering kali terbatas karena harus dibagi dengan sektor lain, sehingga pelaksanaan program

pemberdayaan tidak dapat berjalan secara optimal”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran menjadi faktor penghambat utama dalam proses implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, karena keterbatasan dana menyebabkan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program. Ketidacukupan anggaran berdampak pada kurang optimalnya pelatihan, pengembangan keterampilan, penyediaan infrastruktur, dan dukungan pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif.

Sumber Daya Masyarakat Kelurahan

Sumber daya adalah unsur pelaksana yang juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi implementasi kebijakan. Pada program pemberdayaan dalam meningkatkan ekonomi kreatif di kelurahan ngaglik tentunya perlu adanya ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai untuk mendukung pelaksanaan suatu program. Akan tetapi ketersediaan sumber daya masyarakat atau pelaku UMKM kelurahan ngaglik yang minim akan memperhambat jalanya program pemberdayaan.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ervan Yudhi Setiawan selaku Sekretaris Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu, Kota Batu. Dalam wawancara 28 Oktober 2024 mengatakan:

“Hambatan dalam menjalankan program pemberdayaan terlebih khusus pada proses pemasaran menggunakan media online, masih banyak masyarakat yang belum paham dikarenakan oleh faktor usia dan juga kurangnya pemahaman terhadap penggunaan media online seperti shopee, Instagram, dan juga facebook. Hambatan dalam menjalankan program pemberdayaan, khususnya pada proses pemasaran menggunakan media online, terletak pada masih banyaknya masyarakat yang belum memahami hal tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh faktor usia dan kurangnya pemahaman terhadap penggunaan media online seperti Shopee, Instagram, dan Facebook. Namun, pendampingan akan diberikan oleh pihak kelurahan

agar program yang dijalankan dapat berjalan dengan efektif”

Dari wawancara tersebut menyatakan bahwa tingkat sumber daya masyarakat kelurahan masih sangat minim karena faktor usia, maka dari itu perlu adanya arahan atau pendampingan rutin dari kelurahan guna untuk keberhasilan program pemberdayaan.

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati dirinya, serta mengangkat harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosil, agama dan budaya. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat sering kali untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah umumnya untuk meningkatkan ekonomi dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ekonomi kreatif merupakan bidang usaha yang dapat digeluti masyarakat dalam upaya peningkatan perekonomian. Dalam pemberdayaan masyarakat, bidang ekonomi kreatif sangat potensial dalam menciptakan peluang usaha baru melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Berdasarkan pemaparan konsep ekonomi kreatif yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif bisa menjadi salah satu alternatif bidang usaha untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat salah satunya bagi masyarakat kota Batu. Contohnya kelurahan ngaglik kecamatan batu, kota batu yang saat ini menjadi lokasi yang dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian karena kelurahan ngaglik memiliki banyak potensi dibidang ekonomi kreatif.

Kelurahan Ngaglik, yang terletak di Kecamatan Batu, Kota Batu, adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif. Dengan lingkungan alam yang indah dan budaya lokal yang kaya, Ngaglik memiliki berbagai potensi untuk mengembangkan sektor-sektor seperti pariwisata, kerajinan tangan, dan kuliner lokal. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan karena berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya akses ke pasar sehingga pemerintah perlu memberikan pemberdayaan bagi masyarakat dalam mengembangkan ide-ide kreatif. Pemerintah Kota Batu telah menyadari pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kreatif di wilayahnya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan telah dirancang dan diimplementasikan untuk memberdayakan masyarakat Ngaglik. Kebijakan-kebijakan ini mencakup pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, pengembangan infrastruktur, dan promosi produk lokal. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ngaglik. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti menggunakan teori Edward III, mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik yaitu :

Komunikasi Kebijakan

Dalam hal ini komunikasi dapat berkenaan dengan bagaimana kebijakan publik dapat berkomunikasi pada organisasi publik, terkait dengan proses sosialisasi kebijakan, kejelasan dan konsisten tentang kebijakan serta kecukupan informasi kebijakan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa pola komunikasi yang telah dilakukan oleh pemerintah kelurahan ngaglik sudah berjalan dengan baik dan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kreatif sudah tepat sasaran yaitu masyarakat atau pelaku UMKM kelurahan ngaglik. Pola komunikasi yang digunakan adalah dengan

mengadakan sosialisasi, pelatihan pendampingan, dalam proses pemasaran produk.

Sumber Daya Kebijakan

Dalam hal ini sumber daya dapat dikaitkan dengan tingkat kemampuan (Sumber Daya Manusia) Implementator, sarana penunjang atau fasilitas pendukung kebijakan dan sumber anggaran yang dapat mendukung suatu kebijakan. Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa di kelurahan ngaglik dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kreatif menunjukkan kualitas yang baik. Secara sumber daya aparatur sudah cukup memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab maupun fasilitas dan juga potensi yang di miliki oleh masyarakat kelurahan ngaglik itu sendiri. Sumber anggaran yang diperoleh dari dinas pariwisata sebesar RP. 20.000.000 dan juga beberapa prasarana yang mendukung dalam proses pelatihan pembuatan batik bagi kelompok masyarakat yang bernama “Kembang Tanjung”. selain pelatihan adapun pendampingan dalam proses pemasaran produk. Sehingga hal ini berpotensi menjalankan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kreatif secara efektif.

Disposisi Kebijakan

Dalam hal ini lebih ditekankan pada kesediaan atau komitmen dari para implementator atau carry out kebijakan publik tersebut. Lebih tepatnya berhubungan erat dengan dengan watak dari para implementator seperti kejujuran, komitmen, serta sikap demokratis. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa pemerintah kelurahan ngaglik dalam menjalankan kebijakan selalu berkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai tugas yang diemban selain itu pemerintah kelurahan sangat mendukung penuh setiap pelaku UMKM yang ada di kelurahan ngaglik, Sebagaimana tujuannya dari adanya kebijakan ini adalah

mensejahterakan kehidupan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan kurangnya pengangguran.

Struktur Birokrasi

Dalam hal ini struktur birokrasi dalam artian kesesuaian struktur organisasi dan jalur otoritas didalam birokrasi sangat penting sebagai pelaksana kebijakan publik. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kreatif system kordinasi pemerintah kelurahan dalam menjalankan tugas sudah baik. Terlihat dalam pelaksanaannya sudah ada pembagian tugas dari kasi pemberdayaan sampai dengan stafnya, hal ini di buktikan dengan dalam pelaksanaan kebijakan kasi pemberdayaan selalu berkordinasi dengan teman-teman bagian pemberdayaan dalam hal pelaksanaan program. Selain itu pihak kelurahan berkerja sama dengan dinas pengindustrian dan dinas pariwisata bila ada tamu dari luar daerah selalu mengajak dan memperkenalkan produk-produk yang ada di kelurahan Ngaglik, biasanya yang mengantar tamu-tamu tersebut adalah dari kasi pemberdayaan sehingga dapat membantu berjalannya program pemberdayaan ini. Oleh karena adanya kordinasi dan pembagian tugas ini menjadi standar prosedur operasi yang akan memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif Di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu.

Faktor pendukung merupakan pendorong atau penunjang seperti efetifitas pelaksanaan dalam melaksanakan program pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat tujuan yang dikehendaki.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa berkaitan dengan dengan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kreatif di kelurahan ngaglik sudah sangat baik. Hal ini didasari oleh keterlibatan pemerintah kelurahan ngaglik dan juga partisipasi dari pelaku UMKM dalam pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, pendampingan sampai dengan proses pemasaran serta adanya bentuk kerja sama antara kelurahan dengan dinas pariwisata, dinas pengindustrian dalam proses pemasaran. Sehingga program pemberdayaan bisa berjalan dengan baik

Sedangkan faktor penghambat merupakan efektifitas pelaksanaan yang kurang efektif, efisien dalam setiap kegiatan yang mau direncanakan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif Di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu. adalah keterbatasan anggaran dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat dan tingkat sumber daya masyarakat kelurahan masih sangat minim karena faktor usia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kreatif di Kelurahan Ngaglik, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dipengaruhi oleh empat variabel utama yang dikemukakan dalam teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Pertama, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di Kelurahan Ngaglik berjalan dengan baik, terlihat dari seringkali program-program pemberdayaan disosialisasikan melalui pertemuan warga. Kedua, sumber daya menjadi faktor penting, meskipun program pemberdayaan telah berjalan, kekurangan dana dan terbatasnya akses pasar serta peralatan produksi

menjadi kendala utama. Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan adanya keterlibatan aktif berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, yang tercermin dari kerjasama antara kelurahan dengan dinas terkait dalam pelatihan dan pendampingan. Keempat, struktur birokrasi di Kelurahan Ngaglik sudah baik, memudahkan koordinasi antara lembaga dan masyarakat dalam implementasi kebijakan.

REFERENSI

- Budiono, P. 2014. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Buku Panduan BUMDEs. Bojonegoro
- Daulay, Z. A. 2018. Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dengan Metode Triple Helix (Studi Pada UMKM Kreatif di Kota Medan). Tanishq: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, 1(2), 1-22.
- Faisal Afiff, 2012 artikel Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif, (Jakarta: 2012) dalam bentuk (PDF) <http://www.fe.unpad.ac.id/id/arsip-fakultas-ekonomi-unpad/opini/2198-pilar-pilar-ekonomi-kreatif> diakses tanggal 24 september 2024.
- Fitria. 2020 . Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Adl Islamic Economic, 1(1), 13-28.
- Fitriawan, F. 2020 . Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Melalui Budidaya Jamur Tiram. Amalee: Indonesian Journal of Community Research & Engagement, 1(1), 47–58.
- Fitriawan, F. 2020 . Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Melalui Budidaya Jamur Tiram. Amalee: Indonesian Journal of Community Research & Engagement, 1(1), 47–58.
- Grindle S Merille, 1980. Politics And Policy Implementation In The Third World, Princeton New Jersey.
- Grindle,Merille S. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third
- Gusti Bagus Arjana, Geografi Pariwisata dan Ekonomi

- Kreatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Hasan, M. 2018. Pembinaan Ekonomi Kreatif dalam Perspektif Pendidikan Ekonomi. Jetpen: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 1 (1), 81-86.
- Kuncoro, Mudrajat. 1997. Ekonomi Pembangunan: Teori Dan Masalah Kebijakan. Yogyakarta: YKPN
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato 2015. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. (Bandung: Alfabeta,)
- Moleong, Lex J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya
- Muhammad Alhada Fuadilah Habib (2021) Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif <https://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla/index>, diakses pada tanggal 29 september 2024
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 10 Tahun 2020
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/148404/perda-kota-batu-no-10-tahun-2020>, diakses pada tanggal 30 september 2024
- Sugiyono. 2016 Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung Alfabeta
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Widodo, J. 2021. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing)
- Winarno. Budi 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus., Yogyakarta: CAPS. World New Jersey: Princeton University Press